

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI DESA SUKOMULYO KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013)

Lidia Lusiana¹

Abstrak

Lidia Lusiana, Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Petajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013). Bimbingan Ibu Dr. Fajar Apriani, S.Sos. M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Santi Rande, S.Sos. M.Si selaku Dosen Pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Petajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013) serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Sekolah Dasar Negeri 011 dan Kepala Sekolah Dasar Negeri 013 Sepaku sedangkan informan lainnya adalah guru dari SDN 011 dan SDN 013 beserta orangtua siswa penerima dari SDN 011 dan SDN 013 Sepaku. Sedangkan alat analisis data yang digunakan adalah model interaktif.

Kesimpulan dalam implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Petajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013) masih belum optimal yaitu masih terdapat kendala seperti masih banyak siswa yang kurang mampu yang tidak memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar) sementara KIP tersebut menjadi prioritas untuk dapat memperoleh bantuan PIP dan sosialisasi yang masih kurang maksimal yang seharusnya diberikan kepada orangtua calon penerima. Faktor pendukung dalam PIP di SDN 011 dan SDN 013 Sepaku adalah adanya kerjasama dari pihak sekolah yang membantu orangtua siswa penerima jika ada kesulitan, tersedianya sarana pendukung yaitu komputer yang digunakan untuk mendaftarkan calon penerima bantuan, sedangkan faktor penghambatnya adalah penerima KIP sebagai syarat menerima PIP masih kurang tepat sasaran masih ada yang tidak sesuai dengan kondisi yang riil, jumlah penerima yang diusulkan ke dinas

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

oleh sekolah masih kurang jumlahnya sementara masih banyak siswa yang membutuhkan bantuan serta tidak adanya juklak untuk pedoman sekolah.

Kata Kunci: Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam perkembangan sumber daya manusia. Kebijakan pembangunan dalam bidang pendidikan meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan wajib belajar 12 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada

kelompok masyarakat yang selama ini dianggap kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, ataupun masyarakat penyandang cacat.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan kepada masyarakat khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu adalah melalui digulirkannya Program Indonesia Pintar (PIP) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini merupakan kebijakan turunan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut PIP, adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orangtuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya. Program ini merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sebelumnya ada dan telah bergulir sejak tahun 2008.

Tujuan utama pelaksanaan PIP adalah untuk menekan angka anak putus sekolah dan menarik siswa untuk kembali bersekolah baik yang di tingkat dasar maupun menengah. Selain itu, tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siswa agar dapat meningkatkan prestasi pendidikannya, sehingga dapat menghilangkan kesenjangan antara miskin dan yang kaya.

PIP merupakan penyempurnaan dari Program BSM yang semula penerima hanya siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan formal, kini penerima PIP merupakan siswa dari keluarga miskin yang terdiri atas anak usia sekolah (6-21 tahun) yang bersekolah di lembaga pendidikan formal dan non

formal serta anak tidak sekolah (usia 6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut observasi penulis, dalam pelaksanaan PIP tersebut masih terdapat kendala yaitu masih terdapat penerima yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga dalam penentuan calon penerima bantuan program ini masih kurang tepat sasaran. Selain itu, menurut keterangan dari Kepala Sekolah SDN 011 Sepaku yaitu bapak Suhardi dalam penentuan calon penerima PIP sudah diserahkan nama-nama siswa siswi tetapi pada saat penyeleksian calon penerima, hanya beberapa saja yang mendapatkan beasiswa PIP sehingga tidak sesuai dengan harapan.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Lasswell dan Kaplan (dalam Lubis 2007:9) melihat kebijakan itu sebagai “sarana” untuk mencapai “tujuan”. Kebijakan itu tertuang dalam “program” yang diarahkan kepada pencapaian “tujuan”, “nilai”, dan “praktek” (*a projected program of goals, value, and practices*). Menurut Dunn (dalam Pasolong 2013:39) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan publik merupakan konsep atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berisi sebuah keputusan untuk digunakan atau dijalankan demi kepentingan masyarakat.

Adapun karakteristik atau ciri ciri kebijakan publik diantaranya:

1. Kebijakan Publik merupakan suatu arahan dalam tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah.
2. Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor
3. Kebijakan Publik merupakan sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah
4. Kebijakan Publik merupakan sebuah bentuk konkret negara dengan rakyatnya
5. Kebijakan Publik merupakan suatu rangkaian sebuah instruksi/perintah, contohnya Undang-Undang

Winarno (2012:35) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi dalam beberapa tahapan:

a) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih

dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumusan kebijakan

b) Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada.

c) Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d) Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen pemerintah di tingkat bawah.

e) Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan.

Hinggis (dalam Pasolong 2013:57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Sedangkan menurut Van Meter & Van Horn (dalam Nawawi 2009:131) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan penerapan atau pengaplikasian konsep atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Berikut akan dijabarkan model implementasi kebijakan menurut beberapa pakar.

1. Model Implementasi George C. Edward III (dalam Nawawi 2009:136-139)

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* menurut pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yaitu:

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan dengan jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material, dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.

c. Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan pembuat kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang ditetapkan.

2. Model Implementasi Van Meter & Van Horn (dalam Nawawi 2009:139-141)

Dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

a. Standar dan sasaran kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujud.

b. Sumberdaya implementasi

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*), maupun sumberdaya material (*material resources*), dan sumberdaya metoda (*method resources*).

c. Komunikasi antar organisasi

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-program tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

d. Karakteristik agen pelaksana

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

e. Disposisi implementor

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu:

- 1) Respon implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik.
- 2) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan: dan
- 3) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

f. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan; yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

3. Model implementasi David L. Weimer dan Aidan R. Vining (dalam Tahir 2014:76-77)

Pandangan David L. Weimer dan Aidan R. Vining yang mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- 1) Logika kebijakan
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan, dan
- 3) Kemampuan implementor kebijakan

4. Model implementasi Rippley dan Franklin (dalam Tahir 2014:95-96)

Ripley dan Franklin (dalam Tahir 2014:95) mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu:

1. Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya,
 2. Perspektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah,
 3. Perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.
5. Model implementasi Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2009:93- 94)
- Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2009:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*contex of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:(1) sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*(3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.(4) apakah letak sebuah program sudah tepat.(5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Faktor Penentu Dilaksanakan atau Tidaknya suatu Kebijakan Publik

- a) Faktor penentu pemenuhan kebijakan
 1. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
 2. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah;
 3. Adanya sanksi hukum;
 4. Adanya kepentingan publik;
 5. Adanya kepentingan pribadi;
 6. Masalah waktu
- b) Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan
 1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada;
 2. Tidak adanya kepastian hukum
 3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
 4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut PIP, adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orangtuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya. Program ini merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang sebelumnya ada dan telah bergulir sejak tahun 2008. Program bantuan ini merupakan program penyempurnaan dari program sebelumnya yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM). BSM merupakan program bantuan hanya untuk peserta didik yang belajar di pendidikan formal saja, lain halnya dengan PIP yang diberikan kepada peserta didik yang belajar di pendidikan formal maupun non formal.

Sasaran PIP menurut Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang PIP adalah bagi anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan prioritas antara lain:

- a. Peserta didik pemegang KIP (Kartu Indonesia Pintar).
- b. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus.

Definisi Konsepsional

Di dalam penelitian ini penulis memberikan definisi konsepsional dari implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) adalah upaya pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung kepada siswa yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya, agar pendidikannya dapat berlanjut sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:20) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Jadi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut.

Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa kurang mampu di sekolah:
 - a. Standar dan sasaran kebijakan
 - b. Sumberdaya implementasi
 - c. Komunikasi antar organisasi
 - d. Karakteristik agen pelaksana
 - e. Disposisi implementor

- f. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Indonesia Pintar (PIP).

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau ada hubungannya dengan objek melalui wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti oleh penulis. Penentuan pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Pada tahap penelitian, peneliti akan menjadikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala SDN 011 dan Kepala SDN 013 sebagai key informan dan beberapa guru SDN 011 dan SDN 013 Sepaku beserta beberapa orangtua penerima beasiswa sebagai informan.
2. Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya misalnya dokumen resmi. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan PIP.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan. Untuk penulisan skripsi ini, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)
Yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.
2. Peneliti Lapangan (*Field Work Research*)
Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan teknik Observasi, wawancara, dan dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau mentransportasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Melalui kondensasi data, lebih kuat. penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

Hasil Penelitian

Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program nasional dari pemerintah yang ditujukan kepada peserta didik yang belajar di pendidikan formal maupun non formal. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat kelas menengah ke bawah agar dapat terus bersekolah, sehingga masa depan mereka dapat lebih baik dari sebelumnya. Program ini juga dapat membantu mewujudkan cita-cita pemerintah dalam bidang pendidikan dengan program wajib belajar 12 tahun.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan berdasarkan penetapan sasaran berbasis rumah tangga melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan. Kemudian pihak sekolah akan mendata pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan selanjutnya akan menerima dana langsung melalui bank.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan variabel terpenting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan agar lebih jelas dan terarah. Standar dan sasaran dalam implementasi kebijakan mengarahkan pelaksanaan dimana kebijakan tersebut ditujukan kepada siapa, maka sangat dibutuhkan adanya standar dan sasaran agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik diantara agen pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tepat sarasannya penerima KIP karena pendataan yang kurang tepat oleh pihak ketua RT yang merupakan unsur yang paling dekat dengan keluarga tidak mampu.

Sumberdaya Implementor

Pada variabel sumber kebijakan, sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sumberdaya waktu karena pemanfaatan sumberdaya dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sumberdaya manusia sudah tersedia dalam implementasi program PIP ini, yaitu tersedianya pihak pelaksana di sekolah seperti adanya kepala sekolah sebagai penanggungjawab terlaksananya program dan guru yang terlibat sebagai operator dapodik yang berhubungan langsung dengan data-data calon penerima. Selain itu, sumberdaya anggaran juga telah terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu besar dana yang diterima sebesar Rp 450.000. Begitu juga dengan sumberdaya peralatan sudah cukup memadai untuk digunakan dalam pelaksanaan PIP di sekolah.

Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi merupakan hal yang tidak kalah penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan pemerintah. Komunikasi dapat berupa

informasi yang disampaikan kepada para pelaksana agar dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah dan sasaran sebuah kebijakan tersebut. Pelaksanaan PIP ini melibatkan banyak pihak baik dari dalam organisasi maupun antar organisasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi antara Disdik dengan sekolah sudah berjalan, tetapi hanya saja belum maksimal karena terkendala dengan anggaran. Karena sosialisasi tatap muka membutuhkan anggaran, maka dari itu sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui sosial media. Komunikasi antara sekolah dengan orangtua siswa juga sudah berjalan, tetapi belum maksimal karena masih terdapat orangtua siswa yang tidak mengetahui bahkan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana merupakan variabel dalam implementasi kebijakan yang tidak kalah pentingnya. Dalam implementasi kebijakan harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi agar mencapai keberhasilan yang maksimal.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa struktur pelaksana di Dinas maupun Sekolah tidak ada. Melainkan strukturnya atau para pelaksana dalam pelaksanaan PIP adalah Direktorat Teknis, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Sekolah/Lembaga Pendidikan, Lembaga Penyalur dan Pemangku Kepentingan. Pola hubungan semua Lembaga memiliki tugas yang saling berkaitan dalam pelaksanaan PIP. Dinas Pendidikan mensosialisasikan program kepada sekolah, kemudian sekolah menyampaikan kepada orangtua. Sekolah mengusulkan data yang telah diolah ke pusat kemudian data diolah oleh pusat yang kemudian dikeluarkan nama-nama penerima. Kemudian sekolah menyampaikan kepada penerima untuk pencairan di bank BRI.

Disposisi Implementor

Disposisi implementor atau sikap pelaksana sebuah kebijakan dapat mempengaruhi efektivitas sebuah kebijakan. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan baik tapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa PIP mendapat respon yang baik oleh Kepala Dinas, Kepala Sekolah dan guru terutama orangtua siswa. Dan pihak sekolah juga berusaha melayani orangtua siswa dengan baik bahkan membantu jika terdapat kesulitan.

Kondisi Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

Variabel terakhir yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini sangat mendukung keberhasilan

sebuah implementasi kebijakan, karena dimana kelompok lingkungan tersebut sangat memberikan dukungan agar kebijakan dapat berjalan dan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Dilingkungan sosial dan ekonomi PIP sangat baik, karena desa sukumulyo merupakan desa yang masyarakatnya sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani maka program ini sangat tepat dilaksanakan di desa sukumulyo.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 011 dan SDN 013 Sepaku

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 011 dan SDN 013 Sepaku Desa Sukumulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan hasil penelitian antara lain:

1. Cukup memadainya sarana sekolah yang tersedia untuk membantu proses pendataan .
2. Adanya proses kerjasama pihak sekolah sehingga pelaksanaan berjalan dengan baik.
3. Kondisi orangtua siswa yang mayoritas sebagai petani sehingga program ini membantu sekali.
4. Adanya komitmen dari para pelaksana PIP untuk melaksanakan program pemerintah.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 011 dan SDN 013 Sepaku Desa Sukumulyo Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan hasil penelitian antara lain:

1. Penerima KIP sebagai syarat menerima PIP masih kurang tepat sasaran masih ada yang tidak sesuai dengan kondisi yang riil.
2. Jumlah penerima yang diusulkan ke dinas oleh sekolah masih kurang jumlahnya, sementara masih banyak siswa yang membutuhkan bantuan.
3. Minimnya anggaran untuk melaksanakan sosialisasi lebih dari yang telah dilaksanakan karena membutuhkan anggaran dalam pertemuan tatap muka.

PENUTUP

Kesimpulan

Dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan penelitian “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukumulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013)” penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013) telah terlaksana cukup baik, hanya saja belum optimal. Pelaksanaan PIP belum tepat pada sasaran, yaitu penerima PIP tidak sesuai dengan kondisi yang riil. Selain itu masih rendahnya frekuensi sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan PIP. Berikut pemaparan pelaksanaan PIP dilihat dari berbagai sudut pandang sesuai dengan fokus penelitian:
2. Dilihat dari standar dan sasaran dalam implementasi PIP di SDN 011 dan SDN 013 Sepaku sudah berjalan cukup baik, hanya saja belum optimal. Dikatakan belum optimal karena pelaksanaannya masih tidak tepat pada sasaran. Penerima PIP tidak sesuai dengan kondisi yang riil, dikarenakan tidak tepatnya pada pendataan keluarga kurang mampu.
3. Dilihat dari sumberdaya manusia dalam pelaksanaan PIP sudah cukup memadai yaitu PIP dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang mensosialisasikan PIP, kemudian Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab dan guru yang bertugas sebagai operator dapodik yang berhubungan langsung dalam pendataan penerima PIP, sedangkan untuk sumberdaya anggaran berasal dari pusat yaitu dari dana APBN yang mana dana tersebut dimanfaatkan untuk keperluan kebutuhan perlengkapan sekolah siswa. Sumberdaya peralatan yang dimiliki SDN 011 dan SDN 013 yaitu komputer dan gedung sekolah untuk keperluan sosialisasi orangtua penerima PIP.
4. Dilihat dari komunikasi antar organisasi implementasi PIP dilakukan dalam bentuk sosialisasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kepada Sekolah, kemudian Sekolah kepada orangtua siswa penerima PIP. Komunikasi antara lembaga sudah berjalan, tetapi belum maksimal karena masih terdapat orangtua siswa yang tidak mengetahui bahkan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah.
5. Dilihat dari disposisi implementor di SDN 011 dan SDN 013 Sepaku sudah dikatakan cukup baik karena semua pihak sekolah memberikan respon positif terhadap adanya program ini dan mendukung aktivitas program ini. Bahkan para guru dari pihak sekolah siap membantu melayani para orangtua siswa dengan baik apabila mendapat kesulitan.
6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi sangat mendukung dan setuju dengan adanya PIP ini karena sangat membantu dan menunjang kebutuhan siswa yang kurang mampu.
7. Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi PIP di SDN 011 dan SDN 013 Sepaku adalah cukup memadainya sarana sekolah yang tersedia untuk proses pendataan, adanya proses kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orangtua siswa, kondisi orangtua siswa yang memenuhi kriteria penerima PIP, adanya komitmen yang baik PIP untuk melaksanakan program

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain penerima KIP masih kurang tepat sasaran karena tidak sesuai dengan kondisi riil, kurangnya jumlah penerima yang diusulkan ke dinas oleh sekolah sementara masih banyak siswa yang membutuhkan bantuan, frekuensi sosialisasi yang kurang akibat minimnya anggaran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran-saran terkait implementasi PIP di SDN 011 dan SDN 013 Sepaku Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

1. Seharusnya dari pihak pendataan penerimaan KIP harus diseleksi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi riil penerima, karena KIP merupakan tolak ukur penerimaan PIP dan agar tidak terjadi kecemburuan dengan siswa lainnya yang benar-benar membutuhkan.
2. Sebaiknya mengenai sosialisasi kepada orangtua siswa penerima harus diinformasikan ke semua calon penerima, jangan sampai ada yang tidak mendapat informasi dan tidak mengikuti sosialisasi agar semua dapat mengikuti sosialisasi sehingga penerapan dapat digunakan sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan yang disosialisasikan.
3. Sebaiknya ada komunikasi yang terjalin antara pihak RT, Desa dan Sekolah dalam pendataan keluarga tidak mampu sehingga dalam pelaksanaan bantuan program pemerintah dapat terserap kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju: Bandung.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN: Surabaya.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Kosep, Teori dan Aplikasinya*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. CV.Alfabeta: Bandung.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta: Bandung.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Caps: Yogyakarta.

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar

Internet

<https://www.sekolahpendidikan.com/2017/06/kebijakan-publik-pengertian-tujuan-ciri-macam-macam-dan-proses-perumusan-kebijakan-publik.html>